

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Disdik Butuh Rp 320 Miliar

Palmerah, Warta Kota

Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta membutuhkan dana Rp 320 miliar untuk mengaktifkan kembali Kartu Jakarta Pintar (KJP) para pelajar yang terputus pada tahap 2 tahun 2024.

Dari data yang dipaparkan Disdik dalam rapat bersama Komisi E DPRD, ada 109.274 siswa yang terputus KJP pada tahap 2.

Ratusan pelajar tersebut sebelumnya mendapat KJP pada tahap 1 tahun 2024.

"Perlu sebuah telaah yang mendalam dengan SKPD terkait apakah memang memungkinkan bila menggunakan dana BTT (Belanja Tidak Terduga) ataupun ada pilihan opsi lainnya," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jakarta

KJP pelajar yang terputus dengan catatan verifikasi ulang.

"Kami tetap dilakukan verifikasi ulang. Kalau kondisi sebagian di antaranya tidak memungkinkan (menerima) dari segi persyaratan tetap tidak memenuhi. Tentu akan jadi pengecualian," jelas dia.

Sarjoko mengatakan, pengurangan penerima KJP tahap 2 dilakukan karena keterbatasan anggaran. Alasan lain karena penerapan syarat tertentu.

"Secara data yang memenuhi syarat adalah 669.716 siswa tetapi dari sisi ketersediaan anggaran hanya bisa akomodir 523.622 siswa," tutur dia.

Sebanyak 109.274 siswa terputus KJP pada tahap 2. Sementara sisanya, 36.820 tidak lagi mendaftar sebagai penerima KJP.

Dinas Pendidikan (Disdik) terkait verifikasi data penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

"Setelah itu nanti kami lihat (hasilnya), kami evaluasi beberapa hari ke depan itu dijalankan enggak sama Dinas Pendidikan," katanya.

Agustina menyoroti bahwa banyak penerima KJP Plus yang statusnya dicabut tidak sesuai dengan kriteria dan masih layak untuk menerima kembali bantuan tersebut.

Namun, ia juga menekankan pentingnya penjelasan dari Disdik jika terdapat pelajar yang memang tidak layak menerima KJP.

"Tapi kalau memang pendataan ternyata memang faktanya punya mobil atau salah sasaran, kalau begitu silakan dijelaskan," kata Agustina. (**Kompas.com**)

Sarjoko dalam rapat bersama Komisi E DPRD Jakarta, di Gedung Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Permintaan BTT senilai Rp 320 miliar perlu dikaji kembali oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sebab, BTT digunakan untuk hal yang mendesak. "Kami membutuhkan kurang lebih Rp 320 miliar untuk mengakomodir yang menerima tahap 1, tetapi tidak menerima tahap 2," ujar Sarjoko.

Anggaran yang diperlukan untuk KJP senilai Rp 1,5 triliun. Namun, anggaran yang ada hanya Rp 1,2 triliun, sehingga dibutuhkan tambahan anggaran Rp 320 miliar.

Tambahan anggaran tersebut bakal digunakan untuk mengaktifkan kembali

Dihidupkan kembali

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jakarta, Agustina Hermanto, meminta Dinas Pendidikan menghidupkan kembali KJP Plus untuk siswa yang masih layak mendapatkannya.

"Kami ingin yang kemarin dicabut atau dimatikan yang memang layak dapat dihidupkan kembali," ujar Agustina dalam rapat bersama Disdik yang berlangsung di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/12/2024).

Langkah ini diambil untuk mengidentifikasi penyebab pencabutan 146.094 status kepemilikan KJP yang dilakukan berdasarkan pemadanan data dari verifikasi pada Tahap II Tahun 2024.

Komisi E pun akan memantau evaluasi